



KATA PENGANTAR

Dengan berkat lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018.

Untuk memenuhi hal tersebut diatas, Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu kepada analisis kondisi dan potensi Dinas Sosial Daerah serta hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan 2017.

Demikian kami sampaikan atas perhatian semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 ini, kami ucapkan terima kasih.

Sipirok, 19 Juni 2017

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

dto

HAMDAN ZEIN, SH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	43
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	54
2.4 Review Terhadap RKPD 2018	60
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	73
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	75
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	75
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi	78
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	81
3.4 Program dan Kegiatan	83
BAB IV PENUTUP	99



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1.1 Panti Sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan	14
Tabel 2.1.2 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2012-2016...	15
Tabel 2.1.3 Laju Pertumbuhan PMKS Tahun 2012-2016	16
Tabel 2.1.4 Daftar BDT Kesejahteraan Sosial, KKS, PBI dan Dapodik Tahun 2017	16
Tabel 2.1.5 Indikator Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2014-2016	17
Tabel 2.1.6 Jumlah Peserta BPJS di Kabupaten Tapanuli Selatan	18
Tabel 2.1.7 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Daerah Dan Pencapaian Sampai Dengan Tahun 2017	20
Tabel 2.1.8 Daftar Pegawai dan THL, Status serta Jabatan Tahun 2017 .	33
Tabel 2.1.9 Daftar Barang Inventaris Dinas Sosial Daerah Tahun 2017 ..	35
Tabel 2.1.10 Daftar Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Struktural Tahun 2017	37
Tabel 2.1.11 PMKS yang Mendapat Bantuan dan Penanganan Sosial Tahun 2016 hingga Triwulan III Tahun 2017	38
Tabel 2.1.12 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kategori Tahun 2017	39



Tabel 2.1.13	Daftar TKSK, Tagana, Pendamping PKH, Pendamping Aslut Pendamping ASODK Berat, dan Peksos Tahun 2017	41
Tabel 2.1.14	Daftar Karang Taruna Menurut Kecamatan	42
Tabel 2.1.15	Daftar Penerima Bantuan ASODK Berat, Aslut dan Penyakit Kejiwaan	43
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Daerah	33
Tabel 2.2.2	Daftar TKSK Kasi/Staf Kemasyarakatan Kecamatan, Peksos dan LK3 Kabupaten Tapanuli Selatan dan Wilayah Tugasnya Tahun 2017	52
Tabel 2.2.3	Daftar KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Melalui PKH Tahun 2017	53
Tabel 2.3.1	Pembagian Wewenang Bidang Sosial	57
Tabel 2.4.1	Review Terhadap Rencana Strategis OPD Tahun 2018	61
Tabel 3.4.1	Rumusan Rencana Program Kegiatan Dinas Sosial Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019	86
Tabel 3.4.2	Indikator Kinerja Dinas Sosial Daerah Tahun 2018	98



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sumber Dana APBN Tahun 2018	101
Lampiran 2. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018	104
Lampiran 3. Rekapitulasi Usulan Program Kegiatan Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019	110



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah merupakan dokumen Perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Daerah dengan dorongan serta peran aktif masyarakat pada tahun 2018.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi bidang sosial yang akan dicapai di tahun 2018. Renja juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan telah memberikan warna dan kontribusi secara nyata dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui upaya penanganan untuk meminimalisir menambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam setiap langkah/kegiatan operasi organisasi. Perencanaan mengarahkan organisasi bergerak sesuai dengan arah dan tujuan yang dikehendaki oleh organisasi. Selain dari pada itu perencanaan juga menjadi pedoman untuk keberhasilan dari kegiatan yang



dilaksanakan. Oleh karena itu perencanaan harus disusun secara cermat dengan memperhatikan situasi kondisi yang berkembang saat ini dan perkiraan kondisi yang akan datang sehingga perencanaan tidak saja mampu menjawab permasalahan saat ini akan tetapi juga mampu menjawab permasalahan ke depan.

Dalam kehidupan organisasi bernegara, perencanaan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/ pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Selanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dalam pelaksanaannya diperbuat Rencana kinerja setiap tahun sebagai arah untuk melaksanakan kegiatan dengan target yang akan dicapai dengan memperhatikan kondisi Sumber daya yang dimiliki untuk dapat dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja dengan kewenangan otonomi daerah yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan dokumen Perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan



dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Daerah dengan dorongan serta peran aktif masyarakat untuk tahun 2018.

Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial, berbagai masalah dan tantangan dalam pembangunan telah berkembang semakin berat dan kompleks dan kadang-kadang tidak terduga. Dalam upaya menanggulangi masalah Sosial terutama warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dalam menghadapi tantangan dimaksud, juga telah ditata kembali organisasi dan sistem kerjanya. Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan di daerah sangat berbeda, ini ditentukan oleh hal-hal yang menjadi karakteristik daerah tersebut. Perbedaan selalu ada pada setiap daerah baik perbedaan kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya alam (dalam hal ini potensi daerah). Perbedaan ini menuntut Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki pertimbangan tersendiri dalam menyusun rencana pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan.



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah;



23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);



31. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281);
32. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
33. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
34. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026-2021;
35. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatacara Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 659);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan sekaligus acuan bagi Dinas Sosial Daerah serta menjadi acuan dalam melaksanakan tugas mewujudkan visi misi lima tahun ke depan. Adapun tujuan rencana kerja tahun 2018 adalah :



1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Daerah sehingga dapat lebih terarah dan terukur, tepat waktu, bermutu dan tepat sasaran;
2. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan Dinas Sosial Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 dimaksudkan untuk landasan kebijakan pembangunan selama satu tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban pelaksanaan selama satu tahun.

Adapun Visi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan gambaran tentang keadaan masa mendatang yang ingin dicapai. Visi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

“Terwujudnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi masyarakat yang Produktif, Kompetitif, Mandiri, Bermartabat dan Sejahtera ”

Untuk terlaksananya Visi tersebut, maka Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat.



Adapun tujuan Dinas Sosial Daerah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Dinas Sosial Daerah;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, kelompok, dan komunitas masyarakat.

Sedangkan yang menjadi prioritas untuk mencapai tujuan Dinas Sosial daerah adalah :

1. Peningkatan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pelayanan publik;
2. Pemenuhan kebutuhan standar hidup layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Sasaran organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah adalah :

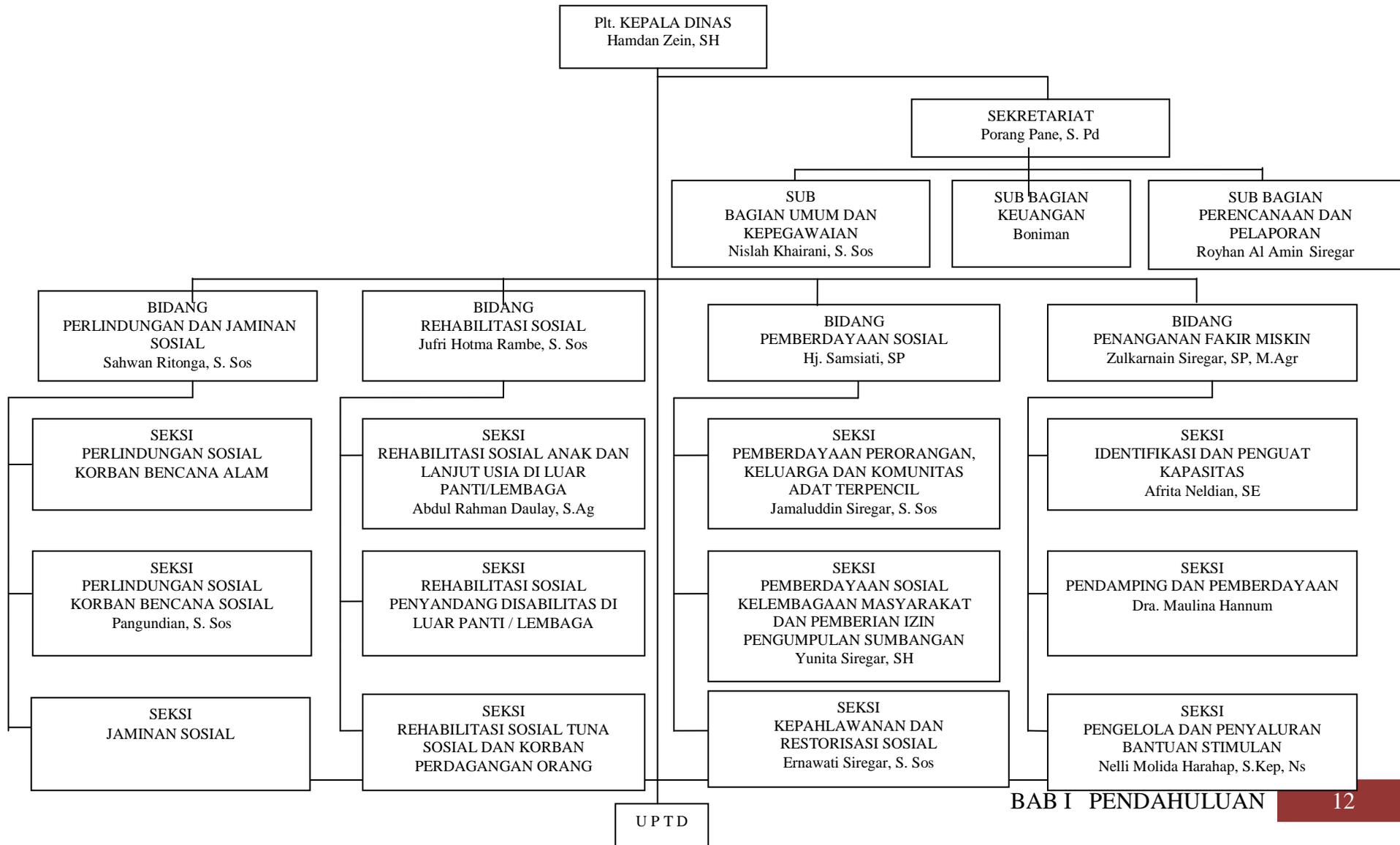
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
2. Terwujudnya standar hidup layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. Meningkatnya kualitas hidup layak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani.

Strategi yang dilakukan untuk memenuhi sasaran Dinas Sosial Daerah adalah :

1. Mendorong dan memfasilitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
2. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah;
3. Menurunkan angka penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial;
Menumbuhkembangkan lembaga dan kegiatan sosial kemasyarakatan.



Bagan 1.
Struktur Organisasi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan





1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Daerah tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap RKPD 2018
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi
- 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Daerah tahun 2016 merupakan salah satu bagian dalam tahapan penyusunan rencana kerja tahun 2018. Bahan evaluasi yang dilakukan berupa pelaksanaan program kegiatan di tahun 2016, seperti sarana sosial, jumlah PMKS yang menerima bantuan, laju pertumbuhan PMKS, jumlah penduduk miskin, serta realisasi anggaran.

Adapun sarana sosial yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah panti asuhan anak dan panti sosial tresna werda/panti jompo. Panti asuhan tersebut seluruhnya dimiliki oleh pihak yayasan Sejak tahun 2011-2017 jumlah panti di Kabupaten Tapanuli Selatan belum ada perubahan yakni sebanyak 4 panti asuhan anak dan 4 panti asuhan jompo, seperti yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Panti Sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017

No (1)	Panti Sosial (2)	Desa/ Kecamatan (3)
Panti Sosial Anak/Panti Asuhan		
1	Panti Asuhan Maimun	Desa Basilam baru Kec. Batang Angkola
2	Panti Asuhan Titian Ridho Ilahi	Desa Huta Holbung Kec. Batang Angkola
3	LKS. Amalia Attahir	Desa Huta Tonga Kec. Batang Angkola
4	Al Hijrah	Desa Bintuju Kec. Batang Angkola
Panti Sosial Tresna Werda/Panti Jompo		
5	Majelis Ta'lim Syech Mhd. Baqi	Desa Basilam Baru Kec. Batang Angkola
6	Jabalul Madaniyah	Desa Sijungkah Kec. Angkola Timur
7	Nurul Falah Tamosu	Desa Panompuan Kec. Angkola Timur
8	Titian Ridho Ilahi	Desa Huta Tonga Kec. Batang Angkola

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2017



Sedangkan jumlah PMKS di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mendapatkan penanganan dengan memperoleh bantuan sosial selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan secara terus menerus, meskipun masih banyak yang belum menerima bantuan sosial. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran sehingga belum sepenuhnya bisa tertangani.

Adapun PMKS yang memperoleh bantuan sosial tahun 2012-2016 dan laju pertumbuhan PMKS tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan (jiwa)	20.145	23.143	23.531	27.112	27.339
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan (jiwa)	33.770	32.380	31.894	29.370	29.770
Persentase PMKS yang Memperoleh bantuan sosial (%)	65,7	74,06	76,41	92,31	91,83

Sumber : Disnakertransos, 2016

Adapun laju pertumbuhan PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan hingga Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.1.3
Laju Pertumbuhan PMKS Tahun 2012-2016

Uraian	Laju Pertumbuhan (%)					Rata-Rata Laju Pertumbuhan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan (jiwa)	1,71	12,95	1,65	13,21	0,83	5,74
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan (jiwa)	5,56	4,29	1,52	8,59	1,34	4,26

Sumber : Disnakertransos, 2016

Adapun daftar Basis Data Terpadu (BDT) Kesejahteraan Sosial, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Penerima Bantuan Iuran (PBI), Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.4
Daftar BDT Kesejahteraan Sosial, KKS, PBI dan Dapodik
Tahun 2017*

No.	KECAMATAN	BDT (Keluarga)	KKS (Keluarga)	PKH (Keluarga)	PBI (Keluarga)	Dapodik (Keluarga)
1	Aek Bilah	686	493	130	282	686
2	Angkola Barat	2,042	1,481	1,022	1,417	2,042
3	Angkola Sangkunar	1,892	1,383	319	858	1,892
4	Angkola Selatan	3,129	2,083	680	1,593	3,129
5	Angkola Timur	2,539	1,237	451	1,176	2,539
6	Arse	879	554	179	495	879
7	Batang Angkola	3,689	1,903	622	1,700	3,689
8	Batang Toru	1,757	811	299	704	1,757
9	Marancar	1,037	615	177	482	1,037
10	Muara Batang Toru	1,133	723	339	540	1,133
11	Saipar Dolok Hole	1,631	1,113	441	987	1,631
12	Sayurmatangi	2,579	1,590	478	1,363	2,579
13	Sipirok	2,850	1,594	553	1,423	2,850
14	Tantom Angkola	1,736	1,067	392	955	1,736
	Total	27,579	16,647	6,082	13,975	27,579

Sumber : Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2017

*Merupakan Hasil Pemutakhiran Data Terpadu Tahun 2015



Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan menurun 0,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan garis kemiskinan di Kabupaten Selatan meningkat menjadi 326.321 per kapita per bulan.

Tabel. 2.1.5
Indikator Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2014-2016

Indikator	Satuan	Tahun		
		2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,74	11,37	11,15
Jumlah Penduduk Miskin	Ribuan Jiwa	29,38	31,20	30,84
Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)	Persen	293.441	300.449	326.321
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Persen	1,91	1,28	1,06
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persen	0,46	0,22	0,19

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan

Sedangkan jumlah peserta badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) menurut kepesertaan dan bulan di Kabupaten Tapnuli Selatan di Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1.6
Jumlah Peserta BPJS di Kabupaten Tapanuli Selatan

Bulan	Jenis Kepesertaan		
	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Non PBI	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	132.872	54.816	187.688
Februari	134.363	55.315	189.678
Maret	134.503	55.869	190.372
April	134.318	57.510	191.828
Mei	133.926	57.781	191.707
Juni	133.627	58.932	192.559
Juli	133.661	58.065	191.726
Agustus	133.607	58.330	191.937
September	133.588	58.724	192.312
Oktober	141.442	59.349	200.791
November	141.389	53.507	194.896
Desember	141.334	53.914	195.248

Sumber : BPJS Kantor Cabang Padangsidempuan

Berdasarkan tabel peserta BPJS di Kabupaten Tapanuli Selatan diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan peserta BPJS dari bulan januari hingga desember melalui penerima bantuan iuran (PBI) per desember sebanyak 141.334 jiwa.

Evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2016 telah mencapai target yang ditetapkan tetapi belum maksimal, hal ini disebabkan sangat minimnya Anggaran.

Tahun Anggaran 2017 dana yang teralokasi dari APBD Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp. 5.960.954.679,- dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.310.954.679,-
- Belanja Langsung : Rp. 3.650.000.000,-



Dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 91,59%. Berarti hampir keseluruhan fisik dan keuangan kegiatan hampir terealisasi, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala dan hambatan. Kendala utama adalah pada tahapan administrasi.



				6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional, roda 4 : 3 unit dan roda 2 : 1 unit (Bulan)	60 Bulan		-	-		12 Bulan	12 Bulan	20.00%	
				9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan kantor dalam kondisi baik (Bulan)	12 bulan		-	-		12 Bulan	12 Bulan	20.00%	
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)	60 Bulan		-	-		12 Bulan	12 Bulan	20.00%	
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (Bulan)	60 Bulan		-	-		12 Bulan	12 Bulan	20.00%	
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat-alat listrik (Bulan)	60 Bulan		-	-		12 Bulan	12 Bulan	20.00%	
				14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor (Bulan)	60 Bulan		-	-		12 Bulan	12 Bulan	20.00%	
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar kantor/majalah dinas (Bulan)	60 Bulan		-	-		12 Bulan	12 Bulan	20.00%	
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor (Kotak)	5861 Kotak		-	-		1209 Kotak	1209 Kotak	20.63%	
				18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH)	1150 OH		-	-		300 OH	300 OH	26.09%	
				19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (OH)	1320 OH		-	-		420 OH	420 OH	31.82%	



				2	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 6 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang, pembantu pengurus barang pengguna 1 orang (%)	100%						100.00%	100.00%	100.00%
						THL 6 orang (Bulan)	468			-	-		78	78	16.67%
						Pejabat pengadaan barang jasa 1 orang (Bulan)	72			-	-		6	6	8.33%
						Tim penerima hasil pekerjaan 3 orang (Bulan)	216			-	-		18	18	16.67%
						Bendahara pengeluaran 1 orang (Bulan)	72			-	-		12	12	16.67%
						Bendahara pembantu juru bayar 1 orang (Bulan)	72			-	-		12	12	16.67%
						Bendahara pembantu pembukuan 1 orang (Bulan)	72			-	-		12	12	16.67%
						Pembantu pengurus barang pengguna 1 orang (Bulan)	72			-	-		12	12	16.67%
				7	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)	33.00%						33.00%	33.00%	100.00%



				17	Peringatan HUT Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pameran pembangunan OPD Dinas dalam rangka HUT Tapanuli Selatan (kali)	5 Kali		-	-		1 Kali	1 Kali	20.00%		
1	1	6	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100%		-	-		100.00%	92.64%	92.64%		
				5	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	10 Unit		-	-		3 Unit	3 Unit	30.00%		
				7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	9 unit		-	-		-	-	0.00%		
				9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	39 unit		-	-		-	-	0.00%		
				10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor (unit)	15 unit		-	-		-	-	0.00%		



				1 1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Brankas 1 Unit, Lemari kabinet 1 unit, Filling kabinet 8 unit, laptop 12 unit, printer 7 unit, kursi kerja 26 unit, kamera EOS 1 unit, proyektor 1 unit, sound system 1 unit, TV LED 2 unit, kulkas 2 unit (unit)	11 Paket = 62 unit = Brankas 1 Unit, Lemari kabinet 1 unit, Filling kabinet 8 unit, laptop 12 unit, printer 7 unit, kursi kerja 26 unit, kamera EOS 1 unit, proyektor 1 unit, sound system 1 unit, TV LED 2 unit, kulkas 2 unit	-	-	11 Paket = 62 unit = Brankas 1 Unit, Lemari kabinet 1 unit, Filling kabinet 8 unit, laptop 12 unit, printer 7 unit, kursi kerja 26 unit, kamera EOS 1 unit, proyektor 1 unit, sound system 1 unit, TV LED 2 unit, kulkas 2 unit	11 Paket = 62 unit = Brankas 1 Unit, Lemari kabinet 1 unit, Filling kabinet 8 unit, laptop 12 unit, printer 7 unit, kursi kerja 26 unit, kamera EOS 1 unit, proyektor 1 unit, sound system 1 unit, TV LED 2 unit, kulkas 2 unit	100.00%	
				2 1	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (Bulan)	48 Bulan	-	-	-	-	0.00%	
				2 3	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (Bulan)	60 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	20.00%	
				2 5	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor (Bulan)	48 Bulan	-	-	-	-	0.00%	
				2 6	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor (Bulan)	48 Bulan	-	-	-	-	0.00%	
				3 3	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Telah diperbaikinya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	3 unit	-	-	1 unit	1 unit	33.33%	



0	0	0	0	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, lakip, laporan keuangan akhir tahun, renja, perubahan renja, RKA, Perubahan RKA, revisi renstra 2016-2021, ranwal renstra 2022-2026 (Dokumen)	28 Dokumen	-	-	6 Dokumen = Lakip, Laporan keuangan akhir tahun, Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA	6 Dokumen = Lakip, Laporan keuangan akhir tahun, Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA	21.43%
				4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas (Dokumen)	8 Dokumen	-	-	-	-	-
1	1	6	1	5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	94.28%		91.72%	92.97%	89.55%	94.99%
				1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah peserta sosialisasi, petugas dan pendamping yang mengikuti sosialisasi (orang)	680 Orang	-	100 Orang	120 orang = 70 orang ; 50 orang	220 orang	32.35%
				2	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	4 Pelatihan; 40 Orang	-	-	-	-	0.00%



				3	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	120 Kepala Keluarga		-	-		-	-	0.00%	
				4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah kepala keluarga yang menerima sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	120 Kepala Keluarga		-	-		-	-	0.00%	
				5	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)	5 Pelatihan; 64 Orang		-	-		1 Pelatihan, 24 orang	1 Pelatihan, 24 orang	37.50%	
				6	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja tim PMKS dan Pemberian bantuan ke panti Sosial	Jumlah panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)	40 Panti		-	-		8 panti	52 orang ; 8 panti	20.00%	
						Jumlah penerima honorarium Tim PMKS	260 orang		-	-		52 orang	52 orang	20.00%	
						Jumlah panti penerima bantuan sosial	40 Panti		-	-		8 Panti	8 panti	20.00%	
1	1	6	1	6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)	43.00%		-	-		35.00%	35.00%	81.40%	
				2	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (orang)	40 Orang		-	-		-	-	0.00%	



				3	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 (orang)	115 Orang; 200 Orang		-	-		-	-	0.00%	
				4	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	Jumlah peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal (orang)	1 Pelatihan, 40 Orang		-	-		-	-	0.00%	
				6	Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center	Tersedianya pusat informasi penyandang cacat dan trauma center (unit)	1 Unit		-	-		-	-	0.00%	
				7	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	jumlah orang yang memperoleh bantuan bagi PMKS (orang)	200 Orang		-	-		-	-	0.00%	
				1 2	Pembinaan/ monitoring Program Keluarga Harapan	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)	360 orang, 6 Dokumen		-	60 Orang		60 orang, 1 Dokumen	120 orang	16.67%	
				1 3	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)	74 Orang		-	-		14 orang	14 orang	18.92%	
1	1	6	1 7		Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase penanganan anak terlantar (%)	30.00%		-	-		22.00%	0.00%	0.00%	
				1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar	Tersedianya sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar (Unit)	1 Unit		-	-		-	-	0.00%	



				3	Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar	Tersusunnya dokumen analisis permasalahan anak terlantar (dokumen)	4 Dokumen		-	-		-	-	0.00%	
				5	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah tenaga pembinaan anak terlantar pada pelatihan keterampilan (orang)	40 Orang		-	-		-	-	0.00%	
1	1	6	1	8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penanganan para penyandang cacat dan trauma (%)	30.00%		-	-		22.00%	22.00%	73.33%	
				1	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Tersusunnya dokumen penyandang cacat dan penyakit kejiwaan (Dokumen)	5 Dokumen		-	-		1 Dokumen	1 Dokumen	20.00%	
				2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Tersedianya sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma (unit)	1 Unit		-	-		-	-	0.00%	
				3	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah peserta pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma (orang)	60 Orang		-	-		-	-	0.00%	
				4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah peserta penyandang cacat dan eks trauma yang diberdayagunakan (orang)	60 Orang		-	-		-	-	0.00%	
				5	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan keterampilan bagi tenaga pelatihan dan pendidik (orang)	52 Orang		-	-		-	-	0.00%	
1	1	6	1	9	Program pembinaan panti asuhan/ jompo										



						Sarana sosial panti asuhan (unit)	20 Unit		-	-		4 unit	4 unit	20.00%	
						Sarana sosial panti jompo (unit)	20 Unit		-	-		4 unit	4 unit	20.00%	
				1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan/jompo (unit)	1 Unit		-	-		-	-	0.00%	
				3	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Meningkatnya penyelenggaraan panti asuhan/jompo (%)	95.00%		-	-		-	-	0.00%	
				4	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)	120 orang		-	-		-	-	0.00%	
				5	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Jumlah peserta peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik bagi penghuni panti asuhan/jompo (orang)	52 orang		-	-		-	-	0.00%	
1	1	6	2	0	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)	30.00%		-	-		22.00%	0.00%	0.00%	
				1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (orang)	60 Orang		-	-		-	-	0.00%	
				2	Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Tersedianya pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial (unit)	1 Unit		-	-		-	-	0.00%	



				4	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayagunakan (orang)	40 Orang		-	-	-	-	0.00%	
				5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, pembangunan aplikasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial, pembangunan website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)	100% = 80 orang, 4 Dokumen, 1 Aplikasi, 1 Website, 4 Dokumen		-	-	-	-	0.00%	
1	1	6	2	1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah karang taruna yang telah dibina	18 karang taruna		-	1 Karang Taruna	3 karang taruna	4 karang taruna	22.22%	
				2	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tersedianya dokumen kerjasama antara pelaku usaha dengan LK3, pusat bimbingan konseling, dan panti asuhan/jompo (Kerjasama)	24 Kerjasama		-	-	-	-	0.00%	
				3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat yang mendapat bantuan fasilitas usaha (orang)	420 Orang; 20 Organisasi		-	40 Orang; 2 Organisasi	40 orang; 2 organisasi	40 Orang; 2 Organisasi	9.52%	
				05	Penanganan konflik sosial	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM TKSK dan penanganan kasus di LK3 (orang)	Pelatihan peningkatan SDM TKSK 150 orang dan Penanganan 75 kasus di LK3		-	-	Pelatihan peningkatan SDM TKSK 30 orang dan Penanganan 15 kasus di LK3	Pelatihan peningkatan SDM TKSK 30 orang dan Penanganan 15 kasus di LK3	20.00%	



					6	Pelestarian nilai - nilai kesetiakawanan	Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keberintisan masyarakat (Kali)	Terselenggara nya hari kesetiakawan an sosial 20 Desember (5 Kali)		-	-		Terselenggara nya hari kesetiakawan an sosial 20 Desember (1 Kali)	Terselenggara nya hari kesetiakawan an sosial 20 Desember (1 Kali)	20.00%	
--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	---	---	--	--	--	--------	--



Adapun daftar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1.8
Daftar Pegawai dan THL (Tenaga Harian Lepas), Status serta
Jabatan Tahun 2017

No.	Nama Pegawai	Status Pegawai	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hamdan Zein, SH	PNS	Plt. Kepala Dinas Sosial
2.	Porang Pane, S. Pd	PNS	Sekretaris
3.	Nislah Khairani, S. Sos	PNS	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Boniman	PNS	Kasubbag Keuangan
5.	Royhan Al Amin Siregar	PNS	Plt. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
6.	Sahwan Ritonga, S. Sos	PNS	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
7.	Pangundian, S. Sos	PNS	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
8.	Hj. Samsiati, SP	PNS	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
9.	Jamaluddin Siregar, S. Sos	PNS	Kasi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil
10.	Yunita Siregar, SH	PNS	Kasi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan
11.	Ernawati Siregar, S. Sos	PNS	Kasi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
12.	Jufri Hotma Rambe, S. Sos	PNS	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



13.	Drs. Ali Sunnah Siregar	PNS	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia di Luar Panti/Lembaga
14.	Abdul Rahman Daulay, S. Ag	PNS	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti/Lembaga
15.	Zulkarnain Siregar, SP, M. Agr	PNS	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
16.	Afrita Neldian, SE	PNS	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
17.	Dra. Maulina Hanum	PNS	Kasi Pendampingan dan Pemberdayaan
18.	Nelli Molida Harahap, S. Kep, Ns	PNS	Kasi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan
19.	Drs. Sabar Makmur	PNS	Staf Subbag Umum
20.	Marhamah, S. Sos	PNS	Staf Subbag Umum
21.	Purnama Nasution, S. Sos	PNS	Staf Subbag Umum
22.	Mhd Jefri Siregar	PNS	Staf Subbag Umum
23.	Khairuddin Siregar	PNS	Staf Subbag Umum
24.	Yevi Masripa	PNS	Staf Subbag Keuangan
25.	Syarifah Batubara, S. Sos.I	PNS	Staf Subbag Keuangan
26.	Fitrianti Harahap	PNS	Staf Perlindungan dan Jaminan Sosial
27.	Azhari, SH	PNS	Staf Pemberdayaan Sosial
28.	Muhammad Yusuf	PNS	Staf Pemberdayaan Sosial
29.	Hj. Siti Elmi Harahap, S. Sos	PNS	Staf Rehabilitasi Sosial
30.	Khairun Nisa	PNS	Staf Rehabilitasi Sosial
31.	Parimpunan, SE	PNS	Staf Penanganan Fakir Miskin
32.	Sri Sartika Pospos	THL	Staf Subbag Umum
33.	Elisa Fatmawati, S.Tr.Keb	THL	Staf Subbag Umum



34.	Ali Sahbana Harahap	THL	Staf Subbag Umum
35.	Eni Herawani, S. Pd	THL	Staf perlindungan dan Jaminan Sosial
36.	Shusi Novita Siregar, S. Pi	THL	Staf Pemberdayaan Sosial
37.	Uswatun Hasanah, S. Pt	THL	Staf Rehabilitasi Sosial

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2017

Sedangkan daftar inventaris Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2017 dalam mendukung kinerja ASN adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.9
Daftar Barang Inventaris Dinas Sosial Daerah
Tahun 2017

No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mobil Daihatsu Terios	1 Unit	2007
2.	Mobil Kijang Innova	1 Unit	2015
3.	Sepeda Motor Honda Supra GTR	2 Unit	2017
4.	Sepeda Motor Honda CB150R	1 Unit	2017
5.	Lemari Merek Montana	1 Unit	2017
6.	Filling Besi Merek Yunika	2 Unit	2011
7.	Filling Besi Merek Awiko	4 Unit	2017
8.	Filling Besi Merek Montana	4 Unit	2017
9.	Brankas	1 Unit	2017
10.	Lemari Kaca	1 Unit	2005
11.	Lemari Kayu	1 unit	2013
12.	Kursi Putar Merek Phoenix	3 Unit	2016
13.	Kursi Lipat Merek Chitose	20 Unit	2017



14.	Meja Biro Merek Sands	2 Unit	2016
15.	Lemari Es Merek LG 1 Pintu	2 Unit	2017
16.	Lemari Es Merek Sharp	1 Unit	2012
17.	Dispenser	1 Unit	2012
18.	Televisi LED 28" Merek LG	2 Unit	2017
19.	Sound System DAT/MP 8900 Rocky	1 Unit	2017
20.	Personal Computer (PC) Merek BenQ	1 Unit	2012
21.	Personal Computer (PC) Merek Asus	1 Unit	2015
22.	Laptop Merek Acer	1 Unit	2013
23.	Note Book Merek Asus 14"	1 Unit	2015
la	Note Book Merek ASUS FX553VD	12 Unit	2017
25.	Printer Merek Epson L385	7 Unit	2017
26.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	2013
27.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural Merek Sands	3 Unit	2016
28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6 Unit	2017
29.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-Lain Merek Chitose	20 Unit	2012
30.	Proyektor Merek Optoma	1 Unit	2017
31.	Kamera Merek Canon EOS 80D	1 Unit	2017
32.	Pesawat Telepon Merek Panasonic	1 Unit	2007
Total		107 Unit	

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2017

Data pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan struktural adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1.10
Daftar Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional dan Struktural Tahun 2017

No.	Nama	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Struktural
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hamdan Zein, SH	-	Diklat PIM Tk. III
2.	Porang Pane, S. Pd	Diklat Proses Pembukuan, Verifikasi dan Penatausahaan LPJ Bendahara di Lingkungan OPD Kabupaten/Kota dan Provinsi	Diklat PIM Tk. III
3.	Pangundian, S. Sos	-	ADUM/PIM Tk. IV
4.	Zulkarnain Siregar, SP, M.Agr	-	Diklat PIM Tk. III
5.	Hj. Samsiati, SP	-	Diklat PIM Tk. IV
6.	Jufri Hotma Rambe, S. Sos	-	Diklat PIM Tk. IV
6.	Royhan Al Amin Siregar	Diklat Dasar PMHP Ahli Diklat PPNS PMHP Kementan RI Diklat LKj Diklat Renstra dan Renja	-
7.	Nislah Khairani, S. Sos	Diklat SKP	ADUM/ PIM Tk.IV
8.	Boniman	Diklat Proses Pembukuan, Verifikasi dan Penatausahaan LPJ Bendahara di Lingkungan OPD Kabupaten/Kota dan Provinsi	-
9.	Syarifah Batubara, S. Sos.I	Diklat SKP	-
10.	Mhd Jefri Siregar	Diklat Penghapusan Barang Aset Inventaris	-

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2017



Adapun penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan dan penanganan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.11

PMKS yang Mendapat Bantuan dan Penanganan Sosial Tahun
2016 hingga Triwulan III Tahun 2017

No.	Jenis Bantuan dan Penanganan Sosial	Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Jiwa)		Jumlah Penerima Penanganan Sosial (Jiwa)	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Raskin/Rastra	19.000	17.972	-	-
2.	Program Keluarga Harapan (PKH)	7.419	7.396	-	-
3.	Asistensi Orang dengan Kecacatan (ASODK)	379	-	379	-
4.	Bantuan Bagi Cacat Fisik	126	-	126	-
5.	Pelatihan Bagi Penyandang Cacat	15	-	15	-
6.	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)	400	480	400	480
7.	Karang Taruna	-	76	-	-
8.	Panti Asuhan dan Panti Jompo	-	564	-	564
9.	Bantuan Bagi PMKS	-	38	-	38
10.	CSR PT Inalum Berupa Bantuan Sembako	-	1000	-	-
11.	Bantuan Bagi Fakir Miskin	-	480	-	-
Total		27.399	27.930	920	1.082

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2017

Adapun data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menurut kategori adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1.12
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kategori
Tahun 2017

No.	Kategori	Jumlah (Orang)
(1)	(2)	(3)
1.	Penderita Sakit Jiwa	30
2.	Fakir Miskin	27.579
3.	Bayi Terlantar	1
4.	Anak Terlantar	2
5.	Lanjut Usia Terlantar	140
6.	Penyandang Tuna Netra	10
7.	Penyandang Tuna Rungu	2
8.	Penyandang Tuna Wicara	4
9.	Penyandang Tuna Wicara-Rungu	4
10.	Penyandang Cacat Fisik	1.010
Total		28.782

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2017

Pada kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan pelatihan keterampilan sablon dan salon. Adapun peserta pelatihan keterampilan sablon merupakan penyandang cacat dengan jumlah sebanyak 12 orang yang bersal dari Kecamatan Batang Angkola sebanyak 6 orang, Kecamatan Angkola Selatan sebanyak 4 orang, dan Kecamatan Sayurmatinggi sebanyak 2 orang, dimana pelaksanaan pelatihan keterampilan sablon dilaksanakan di Kecamatan Batang Angkola. Sedangkan peserta pelatihan keterampilan salon diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan jumlah sebanyak 12 orang yang berasal dari Kecamatan Batang Angkola sebanyak 6 orang, Kecamatan Sayurmatinggi sebanyak 4 orang dan Kecamatan Tano Tombangan Angkola sebanyak 2 orang, yang pelaksanaannya di Kecamatan Sayurmatinggi.



Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Tim PMKS dan Pemberian Bantuan ke Panti Sosial merupakan kegiatan pemberian tali asih dan sosialisasi dalam hal peningkatan kinerja tim PMKS dalam mendampingi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam memperoleh bantuan sosial serta pemberian bantuan sembako ke panti sosial. Adapun jumlah tim PMKS yang memperoleh tali asih adalah Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Daerah sebanyak 1 orang, TKSK Pusat sebanyak 13 orang, Pendamping Asistensi Orang dengan Kecacatan (ASODK) Berat Daerah sebanyak 6 orang, ASODK Berat Pusat sebanyak 8 orang, Pendamping Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut) sebanyak 10 Orang, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 14 orang, sehingga Tim PMKS Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 52 orang. Sedangkan bantuan sosial yang diberikan berupa bantuan sembako ke panti asuhan sebanyak 4 panti yaitu Panti Asuhan Maimun, Panti Asuhan Titian Ridho Ilahi, LKS Amalia Attohir, Alhijrah; dan panti jompo sebanyak 4 panti yaitu Majelis Ta'lim Syech Mhd Baqi, Jabalul Madaniyah, Nurul Falah Tamosu dan Titian Ridho Ilahi

Adapun daftar TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan), Tagana (Taruna Siaga Bencana), Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), Pendamping Aslut (Asistensi Lanjut Usia Terlantar), Pendamping ASODK (Asistensi Orang dengan Kecacatan) Berat, dan Pekerja Sosial (Peksos) adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1.13
Daftar TKSK, Tagana, Pendamping PKH, Pendamping Aslut,
Pendamping ASODK Berat, dan Peksos Tahun 2017

No.	Kecamatan	Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) (Orang)	Taruna Siaga Bencana (Tagana) (Orang)	Pendamping PKH (Orang)	Pendamping Aslut (Orang)	Pendamping ASODK Berat (Orang)	Pekerja Sosial (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aek Bilah	1	-	1	-	1	-
2	Angkola Barat	1	4	5	3	1	-
3	Angkola Sangkununur	1	2	2	-	1	-
4	Angkola Selatan	1	3	4	-	1	-
5	Angkola Timur	1	1	2	3	1	-
6	Arse	1	2	1	-	1	-
7	Batang Angkola	1	2	3	4	1	-
8	Batang Toru	1	3	2	-	1	-
9	Marancar	1	3	1	-	1	-
10	Muara Batang Toru	1	3	2	-	1	-
11	Saipar Dolok Hole	1	-	2	-	1	-
12	Sayurmatangi	1	1	2	-	1	-
13	Sipirok	1	3	3	-	1	-
14	Tantom Angkola	1	1	1	-	1	-
15	Kabupaten Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	2
Total		14	28	31	10	14	2

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2017

Sedangkan karang taruna yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



Tabel 2.1.14
Daftar Karang Taruna Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Karang Taruna (KT)
(1)	(2)	(3)
1	Aek Bilah	3
2	Angkola Barat	6
3	Angkola Sangkununur	10
4	Angkola Selatan	5
5	Angkola Timur	10
6	Arse	8
7	Batang Angkola	6
8	Batang Toru	3
9	Marancar	12
10	Muara Batang Toru	5
11	Saipar Dolok Hole	7
12	Sayurinatinggi	19
13	Sipirok	36
14	Tantom Angkola	8
15	Kecamatan	14
16	Kabupaten	1
Total		153

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2017

Kegiatan Pendataan Cacat dan Penyakit Kejiwaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendata jumlah orang dengan kecacatan berat, lanjut usia terlantar dan yang memiliki penyakit kejiwaan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun data penerima bantuan asistensi orang dengan kecacatan (ASODK) berat, asistensi lanjut usia terlantar (Aslut) dan penyakit kejiwaan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.1.15
Daftar Penerima Bantuan ASODK Berat, Aslut
dan Penyakit Kejiwaan

No.	Kecamatan	Kecacatan Berat (Orang)	Penyakit Kejiwaan (Orang)	Lanjut Usia terlantar (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aek Bilah	3	5	-
2	Angkola Barat	13	-	35
3	Angkola Sangkunur	12	2	-
4	Angkola Selatan	7	-	-
5	Angkola Timur	5	-	39
6	Arse	5	3	-
7	Batang Angkola	11	2	46
8	Batang Toru	9	-	-
9	Marancar	10	-	-
10	Muara Batang Toru	8	-	-
11	Saipar Dolok Hole	8	8	-
12	Sayurimatinggi	13	4	-
13	Sipirok	7	4	-
14	Tantom Angkola	7	2	-
Total		118	30	120

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial, 2017

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Selatan melalui Sekretaris Daerah.



Sebagai bagian yang Integral dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan akan mendukung Visi dan Misi sesuai Renstra 2016-2021 yaitu ” **Terwujudnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menjadi Masyarakat yang Produktif, Kompetitif, Mandiri, Bermartabat dan Sejahtera**”

Adapun yang menjadi indikator utama Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

1. Sarana panti asuhan yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Selatan
Sarana panti asuhan yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2017 sebanyak 4 unit.
2. Sarana panti jompo yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Selatan
Sarana panti jompo yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2017 sebanyak 4 unit.
3. Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial
Adapun persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial pada tahun 2016 sebanyak 27.339 jiwa atau 91,83% dengan target 92,64% , sedangkan pada triwulan III tahun 2017 sebanyak 28.006 jiwa atau 83,97% dengan target 92,97%.
4. Persentase penanganan PMKS
Persentase penanganan PMKS tahun 2016 sebanyak 920 jiwa atau 3,37% dengan target 50%, sedangkan pada triwulan III tahun 2017 sebanyak 1.082 jiwa atau 3,86% dengan target 52%.



Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)						92.97%			91.72%	93.29%	93.62%	
	Jumlah peserta sosialisasi, petugas dan pendamping yang mengikuti sosialisasi (orang)						120 orang = 70 orang ; 50 orang			100 Orang	100 orang = 50 Orang ; 50 orang	110 orang = 60 Orang ; 50 orang	
	Jumlah peserta keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)						-			-	1 Pelatihan; 10 Orang	1 Pelatihan; 10 Orang	
	Jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)						-			-	30 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga	
	Jumlah kepala keluarga yang menerima sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)						-			-	30 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga	
	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)						1 Pelatihan, 24 orang			-	1 Pelatihan; 10 Orang	1 Pelatihan; 10 Orang	
	Jumlah panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)						8 panti			-	8 panti	8 panti	
	Jumlah penerima honorarium Tim PMKS						52 orang			-	52 orang	52 orang	
	Jumlah panti penerima bantuan sosial						8 panti			-	8 panti	8 panti	
2.	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)						35.00%			-	37.00%	39.00%	



	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (orang)						-			-	10 Orang	10 Orang	
	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 (orang)						-			-	20 Orang; 50 Orang	25 Orang; 50 Orang	
	Jumlah peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal (orang)						-			-	1 Pelatihan; 10 Orang	1 Pelatihan; 10 Orang	
	Tersedianya pusat informasi penyandang cacat dan trauma center (unit)						-			-	-	-	
	jumlah orang yang memperoleh bantuan bagi PMKS (orang)						-			-	50 Orang	50 Orang	
	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)						60 orang, 1 Dokumen			60 Orang	60 orang, 1 Dokumen	60 orang, 1 Dokumen	
	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)						14 orang			-	15 Orang	15 Orang	
3.	Persentase penanganan anak terlantar (%)						22.00%			-	24.00%	26.00%	
	Tersedianya sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar (Unit)						-			-	-	1 Unit	
	Tersusunnya dokumen analisis permasalahan anak terlantar (dokumen)						-			-	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah tenaga pembinaan anak terlantar pada pelatihan keterampilan (orang)						-			-	10 Orang	10 Orang	



	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (orang)								-	15 Orang	-	
	Tersedianya pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial (unit)								-	1 Unit	-	
	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan (orang)								-	10 Orang	10 Orang	
	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, pembangunan aplikasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial, pembangunan website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)								-	70% = 20 orang, 1 Dokumen, 1 Aplikasi, 1 website, 1 Dokumen	80% = 20 orang, 1 Dokumen, 1 Dokumen	
7.	Jumlah karang taruna yang telah dibina									3 karang taruna	3 karang taruna	
	Tersedianya dokumen kerjasama antara pelaku usaha dengan LK3, pusat bimbingan konseling, dan panti asuhan/jompo (Kerjasama)								-	6 Kerjasama = 3 Lk3, 1 pusat bimbingan konseling dan 2 panti asuhan/ jompo	6 Kerjasama = 3 Lk3, 1 pusat bimbingan konseling dan 2 panti asuhan/ jompo	
	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat yang mendapat bantuan fasilitasi usaha (orang)								40 orang; 2 organisasi	40 Orang; 2 Organisasi	50 orang; 3 organisasi	70 orang; 4 organisasi



Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM TKSK dan penanganan kasus di LK3 (orang)							Pelatihan peningkatan SDM TKSK 30 orang dan Penanganan 15 kasus di LK3				-	Pelatihan peningkatan SDM TKSK 30 orang dan Penanganan 15 kasus di LK3	Pelatihan peningkatan SDM TKSK 30 orang dan Penanganan 15 kasus di LK3	
Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keperintisan masyarakat (Kali)							Terselenggaranya hari kesetiakawanan sosial 20 Desember (1 Kali)				-	Terselenggaranya hari kesetiakawanan sosial 20 Desember (1 Kali)	Terselenggaranya hari kesetiakawanan sosial 20 Desember (1 Kali)	



Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan pada pasal 1, bahwa TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan /atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. Pada pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pembentukan dan penugasan TKSK meliputi :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan;
- b. Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; dan
- c. Terjalannya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

Sedangkan pada pasal 5 disebutkan tugas TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. Melakukan pemetaan sosial berupa pendataan PMKS dan PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;



- d. Melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat, dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
- e. Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak; dan
- f. Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sumber daya TKSK Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 30 orang dimana 14 orang merupakan TKSK yang telah mendapat surat keputusan dalam penugasan untuk menjalankan tupoksi sebagai TKSK di Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan 16 orang yang terdiri dari 14 orang kepala seksi kemasyarakatan kecamatan dan pekerja sosial (peksos) sebanyak 1 orang serta pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebanyak 1 orang. Sehingga TKSK, Kasi Kemasyarakatan dan Peksos dapat bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan bantuan sosial dan penanganan kasus di LK3.

Adapun daftar TKSK, Kasi/Staf Kemasyarakatan Kecamatan, Peksos, dan LK3 Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2017 yang telah mendapatkan pelatihan peningkatan SDM TKSK dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.2.2
Daftar TKSK, Kasi/Staf Kemasyarakatan Kecamatan, Peksos, dan
LK3 Kabupaten Tapanuli Selatan dan Wilayah Tugasnya
Tahun 2017

No.	Kecamatan	Nama TKSK	Kasi/Staf Kemasyarakatan Kecamatan	Pekerja Sosial (Peksos)	LK3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aek Bilah	Jana Tua Ritonga	Masdiani Pohan	-	-
2	Angkola Barat	Syannif Gunawan Siagian	Hj. Masdalena	-	-
3	Angkola Sangkunur	Syarif Sinaga	Nurliana Ritonga	-	-
4	Angkola Selatan	Muhammad Takdir Saleh	Amida	-	-
5	Angkola Timur	Mahyuddin Harahap	Elpi Hrp	-	-
6	Arse	Hotma Baringin	Syafrianto Hutasuhut	-	-
7	Batang Angkola	Saddam Habibi	Ernawati Lubis	-	-
8	Batang Toru	Mhd Nurin	Napiah Hsb	-	-
9	Marancar	Gustiana	Tajom	-	-
10	Muara Batang Toru	Eka Nadriani Harahap	Siti Kholijah Nst	-	-
11	Saipar Dolok Hole	Drs. Kaddis Santoso MD	Summaidah Ritonga	-	-
12	Sayurmasinggi	Ikhwan Lubis	Nurmalina Nst	-	-
13	Sipirok	Karimuddin Hutabarat	Safruddin Siregar	-	-
14	Tantom Angkola	Putri Wahyuni Siregar	Ramli Junaedi	-	-
15	Kabupaten Tapanuli Selatan	-	-	Tolha	Uswatun Hasanah
Total					

Sumber : Bidang Pemberdayaan Sosial, 2017

Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2017 pada pasal 1, merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.



Pada pasal 2 disebutkan tujuan PKH adalah :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Adapun keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapat bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.3
Daftar KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Melalui PKH
Tahun 2017

No.	Kecamatan	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Keluarga)	
		Tahun 2016	Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aek Bilah	205	184
2	Angkola Barat	519	1.118
3	Angkola Sangkununur	389	386
4	Angkola Selatan	870	862
5	Angkola Timur	493	491
6	Arse	202	201
7	Batang Angkola	757	746
8	Batang Toru	303	397
9	Marancar	238	240
10	Muara Batang Toru	213	410
11	Saipar Dolok Hole	562	573
12	Sayurmatinggi	544	551
13	Sipirok	569	697
14	Tantom Angkola	446	444
Total		6.310	7.300

Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2017



Pada tabel tersebut diatas realisasi KPM PKH tahun 2017 sebanyak 7.300 KPM dari target 7.396 KPM. Hal ini dikarenakan KPM telah pindah domisili atau meninggal (tidak ditemukan), tidak ada lagi komponen yang dapat dibantu, dan sudah dianggap keluarga mampu atau bukan rumah tangga sangat miskin (RTSM). Adapun komponen yang dibantu pada program keluarga harapan terdiri dari komponen kesehatan mulai dari ibu hamil, balita, dan anak pra-sekolah; kompenen pendidikan mulai dari pendidikan tingkat sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, dan sekolah menengah tingkat atas; dan komponen kesejahteraan sosial yaitu lanjut usia dan disabilitas.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas dan fungsi Dinas Sosial Daerah dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan program pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan masih dihadapi hambatan-hambatan yang memerlukan penanganan dan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, antara lain :



1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jumlahnya meningkat setiap tahun sehingga sasaran selalu lebih banyak dari capaian, dimana laju pertumbuhan PMKS yang mendapat bantuan sebesar 5,74%.
2. Sarana dan prasarana serta SDM masih belum mencukupi baik jumlah maupun kapabilitas pegawai, sehingga diperlukan sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM seperti UPTD bidang kesejahteraan sosial pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dinas dan pendamping kesejahteraan sosial, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
3. Sinkronisasi penganggaran antara Pemerintah Provinsi dan Pusat dengan Kabupaten untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial belum optimal, hal ini disebabkan data base PMKS belum tersedia yang digunakan sebagai dasar dalam perumusan program kegiatan yang telah sinkron dengan provinsi dan pusat.
4. Belum optimalnya pembinaan karang taruna tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa sebagai mitra Dinas Sosial Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas.
5. Masih belum optimalnya koordinasi/kerjasama dengan SKPD serumpun dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dari permasalahan sosial yang perlu mendapat perhatian dan keterkaitan dengan urusan serta kewenangan Dinas Sosial maka isu strategis saat ini yang cukup menonjol dalam pembangunan kesejahteraan sosial terutama untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bidang sosial Tahun 2016 - 2021, yang menjadi prioritas penanganan adalah :



1. Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.
2. Masih cukup tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dimana jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial tahun 2016 sebesar 27.339 jiwa atau 91,83% dari 29.770 jiwa yang seharusnya menerima bantuan sosial.
3. Jumlah penduduk kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana jumlah penduduk miskin Tahun 2016 sebesar 30.840 jiwa, dengan persentase penduduk miskin sebesar 11,15% dengan garis kemiskinan Rp. 326.321/Kapita/Bulan.
4. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, dan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.

Adapun pembagian kewenangan bidang sosial antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3.1 Pembagian Kewenangan Bidang Sosial

No	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten
1	Pemberdayaan Sosial	<p>a. Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT).</p> <p>b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah provinsi.</p> <p>c. Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial.</p>	<p>a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.</p> <p>c. Pemberdayaan sosial KAT.</p>	<p>a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan</p> <p>b. dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.</p>
2	Penanganan Warga Negara Migran korban kekerasan	<p>a. Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi sampai ke Daerah provinsi asal.</p> <p>b. Pemulihan trauma korban tindak kekerasan (<i>trafficking</i>) dalam dan luar negeri.</p>	<p>Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal.</p>	<p>Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/ kelurahan asal.</p>



3	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> .	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang memerlukan rehabilitasi pada panti.	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ol style="list-style-type: none">Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antara WNI dengan WNA.Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.Pengelolaan data fakir miskin nasional.	<ol style="list-style-type: none">Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi	<ol style="list-style-type: none">Pemeliharaan anak-anak terlantar.Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.
5	Penanganan Bencana	<ol style="list-style-type: none">Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana nasional.	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.	<ol style="list-style-type: none">Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.



		b. Pembuatan model pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana		b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota
6	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional utama dan makam pahlawan nasional di dalam dan luar negeri.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
7	Sertifikasi dan Akreditasi	a. Pemberian setifikasi kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. b. Pemberian akreditasi kepada lembaga kesejahteraan sosial.		



2.4 Review Terhadap RKPD 2018

RKPD Tahun 2018 menjadi acuan dalam penyusunan rencana Dinas Sosial Daerah Tahun 2018, dimana dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Sosial Daerah.

Adapun review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 terhadap Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rencana Strategis OPD Tahun 2018
Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Rencana Kerja Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	URUSAN WAJIB									
	BIDANG SOSIAL									
	DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN				2,588,125,000					2,942,500,000
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100%	756,744,585	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100%	738,287,400
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tapanuli Selatan	Terpenuhinya jasa surat - menyurat SKPD (Benda Pos)	150 Benda Pos	1,025,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tapanuli Selatan	Terpenuhinya jasa surat - menyurat SKPD (Benda Pos)	150 Benda Pos	1,000,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tapanuli Selatan	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (Bulan)	12 Bulan	41,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tapanuli Selatan	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (Bulan)	12 Bulan	40,000,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional, roda 4 : 3 unit dan roda 2 : 1 unit (Bulan)	12 Bulan	7,175,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional, roda 4 : 3 unit dan roda 2 : 1 unit (Bulan)	12 Bulan	7,000,000



Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kab. Tapanuli Selatan	Peralatan kantor dalam kondisi baik (Bulan)	-	-	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kab. Tapanuli Selatan	Peralatan kantor dalam kondisi baik (Bulan)	-	-
Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)	12 Bulan	48,175,000	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)	12 Bulan	47,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (Bulan)	12 Bulan	42,108,041	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (Bulan)	12 Bulan	41,081,016
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya komponen alat-alat listrik (Bulan)	12 Bulan	15,375,000	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya komponen alat-alat listrik (Bulan)	12 Bulan	15,000,000
Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor (Bulan)	12 Bulan	15,375,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor (Bulan)	12 Bulan	15,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya surat kabar kantor/majalah dinas (Bulan)	12 Bulan	20,500,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya surat kabar kantor/majalah dinas (Bulan)	12 Bulan	20,000,000
Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor (Kotak)	1163 Kotak	20,494,875	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor (Kotak)	465 Kotak	19,995,000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tapanuli Selatan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH)	200 OH	204,897,295	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tapanuli Selatan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH)	76 OH	199,899,800
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Tapanuli Selatan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (OH)	200 OH	94,710,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Tapanuli Selatan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (OH)	360 OH	92,400,000



	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Tapanuli Selatan	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 6 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang, pembantu pengurus barang pengguna 1 orang (%)	100%	245,909,374	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Tapanuli Selatan	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 6 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang, pembantu pengurus barang pengguna 1 orang (%)	100%	239,911,584
2.	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)	33%	-	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)	33%	-
	Peringatan HUT Tapanuli Selatan	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pameran pembangunan OPD Dinas dalam rangka HUT Tapanuli Selatan (kali)	1 Kali	-	Peringatan HUT Tapanuli Selatan	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pameran pembangunan OPD Dinas dalam rangka HUT Tapanuli Selatan (kali)	1 Kali	-
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100%	262,817,175	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100%	713,907,000
	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	4 Unit	-	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	1 Unit	417,500,000



	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	4 unit	61,500,000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	12 Unit	60,000,000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	10 unit	71,750,000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	10 Unit	70,000,000
	Pengadaan Meubelair	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya meubelair kantor (unit)	10 unit	-	Pengadaan Meubelair	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya meubelair kantor (unit)	10 Unit	40,000,000
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Brankas 1 Unit, Lemari kabinet 1 unit, Filling kabinet 8 unit, laptop 12 unit, printer 7 unit, kursi kerja 26 unit, kamera EOS 1 unit, proyektor 1 unit, sound system 1 unit, TV LED 2 unit, kulkas 2 unit (unit)	-	-	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Brankas 1 Unit, Lemari kabinet 1 unit, Filling kabinet 8 unit, laptop 12 unit, printer 7 unit, kursi kerja 26 unit, kamera EOS 1 unit, proyektor 1 unit, sound system 1 unit, TV LED 2 unit, kulkas 2 unit (unit)	-	-
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya gedung kantor (Bulan)	12 Bulan	15,375,000	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya gedung kantor (Bulan)	12 Bulan	15,000,000
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (Bulan)	12 Bulan	98,817,175	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (Bulan)	12 Bulan	96,407,000
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (Bulan)	12 Bulan	-	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (Bulan)	-	-
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Bulan)	12 Bulan	15,375,000	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Bulan)	12 Bulan	15,000,000
	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Telah diperbaikinya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	-	-	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Telah diperbaikinya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	-	-



4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	100%	51,250,000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)	100%	50,000,000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah pakaian dinas harian dan tenun daerah (Stel)	39 stel PDH; 39 stel tenun daerah	-	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah pakaian dinas harian dan tenun daerah (Stel)	-	-
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah pakaian olah raga dan pakaian lapangan (Stel)	80 Stel	51,250,000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah pakaian olah raga dan pakaian lapangan (Stel)	80 Stel	50,000,000
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	20 orang	71,750,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	20 orang	30,000,000
	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	20 orang	71,750,000	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	4 orang	30,000,000
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100%	102,500,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	100%	100,000,000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, lakip, laporan keuangan akhir tahun, renja, perubahan renja, RKA, Perubahan RKA, revisi renstra 2016-2021, ranwal renstra 2022-2026 (Dokumen)	6 Dokumen = Lakip, Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA, Revisi Renstra 2016-2021	98,000,000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, lakip, laporan keuangan akhir tahun, renja, perubahan renja, RKA, Perubahan RKA, revisi renstra 2016-2021, ranwal renstra 2022-2026 (Dokumen)	6 Dokumen = Lakip, Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA, Revisi Renstra 2016-2021	96,503,200



	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas (Dokumen)	2 Dokumen = Laporan Keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas	4,500,000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas (Dokumen)	2 Dokumen = Laporan Keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas	3,496,800
6.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93,29%	378,948,240	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93,62%	369,705,600
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta sosialisasi, petugas dan pendamping yang mengikuti sosialisasi (orang)	100 orang = 50 Orang ; 50 orang	154,775,000	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta sosialisasi, petugas dan pendamping yang mengikuti sosialisasi (orang)	100 orang = 50 Orang ; 50 orang	151,000,000
	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	1 Pelatihan; 10 Orang	-	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	-	-
	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	30 Kepala Keluarga	30,750,000	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	20 Kepala Keluarga	30,000,000



	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah kepala keluarga yang menerima sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	30 Kepala Keluarga	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah kepala keluarga yang menerima sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	-	-
	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)	1 Pelatihan; 10 Orang	71,750,000	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)	1 Pelatihan; 10 Orang	70,000,000
	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja tim PMKS dan Pemberian bantuan ke panti Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)	8 panti	121,673,240	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja tim PMKS dan Pemberian bantuan ke panti Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)	8 panti	118,705,600
8.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)	37%	445,875,000	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)	39%	435,000,000
	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (orang)	10 Orang	20,500,000	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (orang)	10 Orang	20,000,000
	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 (orang)	20 Orang; 50 Orang	51,250,000	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 (orang)	20 Orang; 50 Orang	50,000,000



	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal (orang)	1 Pelatihan; 10 Orang	-	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal (orang)	-	-
	Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya pusat informasi penyandang cacat dan trauma center (unit)	-	-	Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya pusat informasi penyandang cacat dan trauma center (unit)	-	-
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Kab. Tapanuli Selatan	jumlah orang yang memperoleh bantuan bagi PMKS (orang)	50 Orang	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Kab. Tapanuli Selatan	jumlah orang yang memperoleh bantuan bagi PMKS (orang)	-	-
	Pembinaan/ monitoring Program Keluarga Harapan	Kab. Tapanuli Selatan	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)	60 orang, 1 Dokumen	276,750,000	Pembinaan/ monitoring Program Keluarga Harapan	Kab. Tapanuli Selatan	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)	60 orang, 1 Dokumen	270,000,000
	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)	15 Orang	97,375,000	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)	15 Orang	95,000,000
9.	Program Pembinaan Anak Terlantar		Persentase penanganan anak terlantar (%)	24%	-	Program Pembinaan Anak Terlantar		Persentase penanganan anak terlantar (%)	26%	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar (Unit)	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar (Unit)	-	-
	Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya dokumen analisis permasalahan anak terlantar (dokumen)	1 Dokumen	-	Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya dokumen analisis permasalahan anak terlantar (dokumen)	-	-



	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah tenaga pembinaan anak terlantar pada pelatihan keterampilan (orang)	10 Orang	-	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah tenaga pembinaan anak terlantar pada pelatihan keterampilan (orang)	-	-
10.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		Persentase Penanganan para penyandang cacat dan trauma (%)	24%	236,365,000	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		Persentase Penanganan para penyandang cacat dan trauma (%)	26%	230,600,000
	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya dokumen penyandang cacat dan penyakit kejiwaan (Dokumen)	1 Dokumen	133,865,000	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya dokumen penyandang cacat dan penyakit kejiwaan (Dokumen)	1 Dokumen	130,600,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma (unit)	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma (unit)	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma (orang)	15 Orang	102,500,000	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma (orang)	15 Orang	100,000,000
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta penyandang cacat dan eks trauma yang diberdayagunakan (orang)	15 Orang	-	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta penyandang cacat dan eks trauma yang diberdayagunakan (orang)	-	-
	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan keterampilan bagi tenaga pelatihan dan pendidik (orang)	10 Orang	-	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan keterampilan bagi tenaga pelatihan dan pendidik (orang)	-	-
11.	Program pembinaan panti asuhan/ jompo				71,750,000	Program pembinaan panti asuhan/ jompo				70,000,000



			Sarana sosial panti asuhan (unit)	4 unit				Sarana sosial panti asuhan (unit)	4 unit	-
			Sarana sosial panti jompo (unit)	4 unit				Sarana sosial panti jompo (unit)	4 unit	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan/jompo (unit)	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan/jompo (unit)	-	-
	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Meningkatnya penyelenggaraan panti asuhan/jompo (%)	-	-	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Meningkatnya penyelenggaraan panti asuhan/jompo (%)	-	-
	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)	30 Orang	71,750,000	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)	30 Orang	70,000,000
	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik bagi penghuni panti asuhan/jompo (orang)	10 Orang	-	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik bagi penghuni panti asuhan/jompo (orang)	-	-
12.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)		Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)	24%	158,875,000	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)		Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)	26%	155,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (orang)	15 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (orang)	-	-
	Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial (unit)	1 Unit	-	Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial (unit)	-	-



	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayagunakan (orang)	10 Orang	-	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayagunakan (orang)	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, pembangunan aplikasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial, pembangunan website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)	70% = 20 orang, 1 Dokumen, 1 Aplikasi, 1 website, 1 Dokumen	158,875,000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, pembangunan aplikasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial, pembangunan website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)	70% = 20 orang, 1 Dokumen, 1 Aplikasi, 1 website, 1 Dokumen	155,000,000
13.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Jumlah karang taruna yang telah dibina	3 karang taruna	51,250,000	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Jumlah karang taruna yang telah dibina	3 karang taruna	50,000,000
	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya dokumen kerjasama antara pelaku usaha dengan LK3, pusat bimbingan konseling, dan panti asuhan/jompo (Kerjasama)	6 Kerjasama = 3 Lk3, 1 pusat bimbingan konseling dan 2 panti asuhan/jompo	20,500,000	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya dokumen kerjasama antara pelaku usaha dengan LK3, pusat bimbingan konseling, dan panti asuhan/jompo (Kerjasama)	6 Kerjasama = 3 Lk3, 1 pusat bimbingan konseling dan 2 panti asuhan/jompo	20,000,000
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat yang mendapat bantuan fasilitasi usaha (orang)	50 orang; 3 organisasi	-	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat yang mendapat bantuan fasilitasi usaha (orang)	-	-



	Penanganan konflik sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM TKSK dan penanganan kasus di LK3 (orang)	Pelatihan peningkatan SDM TKSK 30 orang dan Penanganan 15 kasus di LK3	-	Penanganan konflik sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM TKSK dan penanganan kasus di LK3 (orang)	-	-
	Pelestarian nilai - nilai kesetiakawanan	Kab. Tapanuli Selatan	Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keperintisan masyarakat (Kali)	Terselenggaranya hari kesetiakawanan sosial 20 Desember (1 Kali)	30,750,000	Pelestarian nilai - nilai kesetiakawanan	Kab. Tapanuli Selatan	Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keperintisan masyarakat (Kali)	Terselenggaranya hari kesetiakawanan sosial 20 Desember (1 Kali)	30,000,000
TOTAL					2,588,125,000					2,942,500,000



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masyarakat. Adapun aspirasi masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial berupa pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan usaha produktif PMKS.

Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum khususnya Dinas Sosial Daerah.



Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Daerah Tahun 2018 didasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial RI dalam 5 tahun (2015-2019) akan melaksanakan 3 (tiga) dari 7 (tujuh) misi pemerintah, yaitu misi keempat : Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; misi kelima : Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; misi ketujuh : Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan. Sedangkan dalam agenda prioritas nasional yang dikenal dengan Nawacita, Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Nawacita, yaitu Nawacita ketiga : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; Nawacita kelima : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Nawacita kedelapan : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan Nawacita kesembilan : Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sehingga peran dan fungsi Kementerian Sosial akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, komunitas adat terpencil (KAT) serta kelompok marjinal lainnya yang dilandasi semangat kegotong-royongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009, merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,



dan perlindungan sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sedangkan menurut RPJMN 2015-2019, perlindungan sosial yang komprehensif merupakan amanat yang diemban Kementerian Sosial RI dan merupakan perpaduan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar sektoral untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan. Secara umum permasalahan sosial dapat dikelompokkan menjadi :

1. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan rentan serta kelompok marjinal lainnya;
2. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang belum komprehensif, termasuk membedakan antara asistensi regular dan asistensi temporer bagi penduduk miskin dan rentan;
3. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses penjangkauan pelayanan dasar.

Adapun Faktor-faktor Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Daerah yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari kebijakan nasional adalah sebagai berikut :



- a. Masih kurang kesadaran bagi masyarakat tentang pengertian PMKS;
- b. Belum lengkapnya data–data PMKS di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. Masih minimnya fasilitas di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- d. Keterbatasan dana APBD Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga dana untuk sebagian besar kegiatan Dinas belum tertampung;
- e. Keterbatasan dana yang tertampung untuk kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- f. Kurangnya perhatian masyarakat;
- g. Belum tertampungnya dana untuk identifikasi, sosialisasi ke daerah;
- h. Masih kurangnya motivasi masyarakat untuk kerja mandiri.

Sedangkan faktor–faktor pendorong pelayanan Dinas Sosial Daerah yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari Kebijakan Nasional :

1. Adanya sarana untuk tempat pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
2. Besarnya animo masyarakat di pedesaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
3. Adanya sarana dan prasarana serta fasilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
4. Penyediaan dana untuk kegiatan PMKS dan penyediaan sarana dan prasarana.



3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara, ada 3 (tiga) misi yang terkait erat dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan, antara lain :

- a. Misi Pertama yaitu Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Mandiri Dan Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta meningkatkan kepekaan sosial melalui pengembangan berbagai program yang lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, yang berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);
- b. Misi Ketiga yaitu Mewujudkan Sumatera Utara yang Berbudaya, Religius Dalam Keberagaman, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam keberagaman maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan kepada kebijakankebijakan yang mampu menciptakan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai serta menyelesaikan dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya;



- c. Misi Keempat yaitu Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Partisipatif Dan Peduli Terhadap Proses Pembangunan, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi pemberdayaan masyarakat demi menciptakan masyarakat yang mandiri arah kebijakan pembangunan kedepannya diarahkan kepada : penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling); memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) serta melindungi kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah; peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi sebagai penunjang pembangunan; menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni dalam keberagamaan; mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan.

Adapun strategi Pemerintah Provinsi Sumatera dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (*strategy basic need*) dilaksanakan melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui urusan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, pengembangan sistem perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas. Peningkatan derajat kesejahteraan sosial masyarakat yang diarahkan pada kebijakan kualitas, perlindungan dan penanggulangan masalah sosial melalui :



1. Perhatian terhadap masalah kualitas perlindungan, pelayanan, dan jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem perlindungan sosial yang terpadu, yang mampu menjangkau seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. Perbaiki kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan peran serta berbagai komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
5. Mengupayakan kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Sosial Daerah yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari Kebijakan Daerah, antara lain :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana dasar serta rumah layak huni
- b. Menurunkan angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan memberikan bantuan sosial dan penanganan PMKS
- c. Menurunkan jumlah kemiskinan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan dan bantuan dana usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin
- d. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, serta meningkatkan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender anak.



Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, meningkatkan peran perempuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sosial.

3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan yang ditetapkan adalah untuk memberi batasan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari Misi yang telah digariskan. Tujuan ini merupakan suatu target yang ingin dicapai Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1. Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
4. Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana.
5. Meningkatkan mutu, keterjangkauan dan profesionalitas pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sasaran jangka pendek yang ingin dicapai adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diperkirakan dapat dicapai pada tahun 2017 adalah :

1. Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan pada umumnya;
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sosial;



3. Berkembangnya kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka perlindungan, jaminan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial;
4. Meningkatnya penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3.4 Program dan Kegiatan

Dalam upaya mencapai Visi dan Misi, maka Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan membuat Usulan Program sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan kondisi serta permasalahan yang dihadapi saat ini maka Dinas Sosial Daerah menyusun rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun prioritas kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Penyediaan jasa surat–menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang–undangan
- Penyediaan makanan dan minuman



- Rapat-rapat konsultasi dan kordinasi ke luar daerah
- Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah
- Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pengelolaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan Meubelair
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya, Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
- Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Tim PMKS dan Pemberian Bantuan ke panti sosial

6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan rehabilitas sosial masyarakat, Adapun Kegiatan–kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak
- Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Pembinaan/Monitoring Program Keluarga Harapan
- Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)

7. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan terhadap para penyandang cacat dan trauma. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan
- Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma



8. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan panti asuhan/ jompo, Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan profil PMKS serta sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial

9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menjalin kerjasama antara pengusaha-pengusaha ataupun perorangan dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal pemberian dan penanganan sosial.
- Pelestarian nilai - nilai kesetiakawanan



Tabel 3.4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Daerah Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Tapanuli Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB								
	BIDANG SOSIAL								
1 0 1 6 1 0 1	DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN				2,942,500,000	APBD			2,588,125,000
1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100%	738,287,400	APBD		100%	756,744,585
1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat - menyurat SKPD (Benda Pos)	Kab. Tapanuli Selatan	150 Benda Pos	1,000,000	APBD		150 Benda Pos	1,025,000
1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12 Bulan	40,000,000	APBD		12 Bulan	41,000,000



1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah serta pengganti transport petugas kegiatan Hut Tapsel (OH)	Kab. Tapanuli Selatan	360 OH	92,400,000	APBD		360 OH	94,710,000
1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 6 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang, pembantu pengurus barang pengguna 1 orang, honorarium panitia Hut Tapsel (%)	Kab. Tapanuli Selatan	100%	239,911,584	APBD		100%	245,909,374
1	0	0	1	0	0	0	0	0	7	Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)		33%	-	APBD		33%	-
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Peringatan HUT Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pameran pembangunan OPD Dinas dalam rangka HUT Tapanuli Selatan (kali)	Kab. Tapanuli Selatan	1 Kali	-	APBD		1 Kali	-
1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)		100%	713,907,000	APBD		100%	262,817,175



1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Telah diperbaikinya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	APBD	1 unit	-
1	0	0	1	0	0	0	0	0		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)		100%	50,000,000.00	APBD	100%	51,250,000
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian dan tenun daerah (Stel)	Kab. Tapanuli Selatan	39 stel PDH; 39 stel tenun daerah	-	APBD	39 stel PDH; 39 stel tenun daerah	-
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olah raga dan pakaian lapangan (Stel)	Kab. Tapanuli Selatan	40 Stel pakaian olah raga dan 40 stel pakaian lapangan	50,000,000.00	APBD	40 Stel pakaian olah raga dan 40 stel pakaian lapangan	51,250,000.00
1	0	0	1	0	0	0	0	0		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)		20 orang	30,000,000	APBD	20 orang	71,750,000
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	4 Orang	30,000,000	APBD	9 Orang	71,750,000
1	0	0	1	0	0	0	0	0		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)		100%	100,000,000	APBD	100%	102,500,000



1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	Kab. Tapanuli Selatan	20 Kepala Keluarga	30,000,000	APBD		20 Kepala Keluarga	30,750,000
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah kepala keluarga yang menerima sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	Kab. Tapanuli Selatan	30 Kepala Keluarga	-	APBD		30 Kepala Keluarga	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	1 Pelatihan; 10 Orang	70,000,000	APBD		1 Pelatihan; 10 Orang	71,750,000
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja tim PMKS dan Pemberian bantuan ke panti Sosial	Jumlah panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)	Kab. Tapanuli Selatan	8 panti	118,705,600	APBD		8 panti	121,673,240
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Sosialisasi dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Tersusunnya dokumen penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	APBD		-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)		37%	435,000,000	APBD		39%	445,875,000
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	10 Orang	20,000,000	APBD		10 Orang	20,500,000



1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 dan penyediaan pos LK3 Kecamatan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	20 Orang; 50 Orang	50,000,000	APBD		25 Orang; 50 Orang	51,250,000
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	Jumlah peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	1 Pelatihan; 10 Orang	-	APBD		1 Pelatihan; 10 Orang	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center	Tersedianya pusat informasi penyandang cacat dan trauma center (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	APBD		-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	jumlah orang yang memperoleh bantuan bagi PMKS (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	50 Orang	-	APBD		50 Orang	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	Pembinaan/ monitoring Program Keluarga Harapan	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	60 orang, 1 Dokumen	270,000,000	APBD		60 orang, 1 Dokumen	276,750,000
1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	15 Orang	95,000,000	APBD		15 Orang	97,375,000
1	0	0	1	0	0	0	0	1		Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase penanganan anak terlantar (%)		24%	-	APBD		26%	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar	Tersedianya sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar (Unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	APBD		1 Unit	-



1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar	Tersusunnya dokumen analisis permasalahan anak terlantar (dokumen)	Kab. Tapanuli Selatan	1 Dokumen	-	APBD	1 Dokumen	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah tenaga pembinaan anak terlantar pada pelatihan keterampilan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	10 Orang	-	APBD	10 Orang	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penanganan para penyandang cacat dan trauma (%)		24%	230,600,000	APBD	26%	236,365,000
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Tersusunnya dokumen penyandang cacat dan penyakit kejiwaan (Dokumen)	Kab. Tapanuli Selatan	1 Dokumen	130,600,000	APBD	1 Dokumen	133,865,000
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Tersedianya sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	APBD	-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah peserta pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	15 Orang	100,000,000	APBD	15 Orang	102,500,000
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah peserta penyandang cacat dan eks trauma yang diberdayakan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	15 Orang	-	APBD	15 Orang	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan keterampilan bagi tenaga pelatihan dan pendidik (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	10 Orang	-	APBD	12 Orang	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Program pembinaan panti asuhan/ jompo				70,000,000	APBD		71,750,000



1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayagunakan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	10 Orang	-	APBD		10 Orang	-
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, pembangunan aplikasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial, pembangunan website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)	Kab. Tapanuli Selatan	70% = 20 orang, 1 Dokumen, 1 Aplikasi, 1 website, 1 Dokumen	155,000,000	APBD		80% = 20 orang, 1 Dokumen, 1 Dokumen	158,875,000
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah karang taruna yang telah dibina		3 karang taruna	50,000,000	APBD		3 karang taruna	51,250,000
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tersedianya dokumen kerjasama antara pelaku usaha dengan LK3, pusat bimbingan konseling, dan panti asuhan/jompo (Kerjasama)	Kab. Tapanuli Selatan	6 Kerjasama = 3 Lk3, 1 pusat bimbingan konseling dan 2 panti asuhan/ jompo	20,000,000	APBD		6 Kerjasama = 3 Lk3, 1 pusat bimbingan konseling dan 2 panti asuhan/ jompo	20,500,000
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat yang mendapat bantuan fasilitasi usaha (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	50 orang; 3 organisasi	-	APBD		70 orang; 4 organisasi	-



1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Penanganan konflik sosial	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM TKSK dan penanganan kasus di LK3 (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	Pelatihan peningkatan SDM TKSK 30 orang dan Penanganan 15 kasus di LK3	-	APBD		Pelatihan peningkatan SDM TKSK 30 orang dan Penanganan 15 kasus di LK3	-
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Pelestarian nilai - nilai kesetiakawanan	Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keperintisan masyarakat (Kali)	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggara nya hari kesetiakawan an sosial 20 Desember (1 Kali)	30,000,000	APBD		Terselenggara nya hari kesetiakawan an sosial 20 Desember (1 Kali)	30,750,000



Tabel 3.4.2
INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAERAH
TAHUN 2018
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan (%)	65%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2. Terselenggaranya peningkatan prasarana dan sarana aparatur	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	20 Orang
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4. Terpenuhinya kewajiban pelaporan kinerja SKPD	100%
2.		a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) b. Sarana sosial panti asuhan (unit) c. Sarana sosial panti jompo (unit) d. Persentase penanganan PMKS (%)	93,29% 4 Unit 4 Unit 54%
	Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5. Pesentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93,29%
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	6. Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)	37%
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	7. Persentase penanganan para penyandang cacat dan trauma (%)	24%
	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo	8. Sarana sosial panti asuhan (Unit); Sarana sosial panti jompo (Unit)	4 Unit ; 4 Unit
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	9. Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)	24%
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10. Jumlah karang taruna yang telah dibina	3 Karang Taruna



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Periode 2016-2021, dalam Rencana Kerja Tahun 2018 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2018 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2018. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan pada umumnya.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sumber Dana APBN Tahun 2018

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Dinas Sosial Daerah Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Tapanuli Selatan
Sumber Dana APBN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Hasil Desk TA. 2018			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sangat Prioritas	Prioritas	APBD I	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sumber Dana APBN													
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Sosial				35,837,500,000				44,796,875,000	35,837,500,000			
	1 5 Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				3,937,500,000				4,921,875,000	3,937,500,000			
	0 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin				3,937,500,000				4,921,875,000	3,937,500,000			



			1	Pembinaan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kabupaten Tapanuli Selatan	200 Kepala Keluarga	3,750,000,000	APBN	-	200 Kepala Keluarga	4,687,500,000	3,750,000,000	-	-	APBN
			2	Pembinaan dan Pemberian Bantuan Bagi Keluarga Rentan	Jumlah terbina dan terberdayanya keluarga rentan	Kabupaten Tapanuli Selatan	30 Kepala Keluarga	187,500,000	APBN	-	30 Kepala Keluarga	234,375,000	187,500,000	-	-	APBN
			16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				30,150,000,000				37,687,500,000	30,150,000,000			
			07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS				2,025,000,000				2,531,250,000	2,025,000,000			
			3	Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	Jumlah asistensi lanjut usia terlantar	Kabupaten Tapanuli Selatan	250 Orang	1,125,000,000	APBN	-	250 Orang	1,406,250,000	1,125,000,000	-	-	APBN
			4	Asistensi Orang dengan Kecacatan Berat (ASODK Berat)	Jumlah asistensi terhadap orang dengan kecacatan berat	Kabupaten Tapanuli Selatan	200 Orang	900,000,000	APBN	-	200 Orang	1,125,000,000	900,000,000	-	-	APBN
			12	Pembinaan/Monitoring Program Keluarga Harapan				28,125,000,000				35,156,250,000	28,125,000,000			
			5	Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah keluarga dalam pemberdayaan keluarga harapan	Kabupaten Tapanuli Selatan	8.000 Kepala Keluarga	26,250,000,000	APBN	-	8.000 Kepala Keluarga	32,812,500,000	26,250,000,000	-	-	APBN



			6	Pendamping, Operator, dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pendamping, operator dan koordinator pada Program Keluarga Harapan	Kabupaten Tapanuli Selatan	35 Orang	1,875,000,000	APBN	-	35 Orang	2,343,750,000	1,875,000,000	-	-	APBN
			2	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				1,750,000,000				2,187,500,000	1,750,000,000			
			0	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat				1,750,000,000				2,187,500,000	1,750,000,000			
			7	Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin	Jumlah masyarakat miskin berkurang	Kabupaten Tapanuli Selatan	700 Kepala Keluarga	1,750,000,000	APBN	-	700 Kepala Keluarga	2,187,500,000	1,750,000,000	-	-	APBN
Total APBN								35,837,500,000				44,796,875,000	35,837,500,000			



Lampiran 2. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Dinas Sosial Daerah Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Tapanuli Selatan
Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Hasil Desk TA. 2018			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sangat Prioritas	Prioritas	APBD I	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara													
					9,270,000,000				11,587,500,000	9,270,000,000			
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Sosial												
					4,790,000,000				5,987,500,000	4,790,000,000			
	15	Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya											



				01	Peningkatan Kemampuan (<i>Capacity Building</i>) Pugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				300,000,000				375,000,000	300,000,000		
				1	Pemantapan bagi pekerja sosial masyarakat	Jumlah pekerja sosial masyarakat	Kabupaten Tapanuli Selatan	45 Orang	200,000,000	APBD I	-	45 Orang	250,000,000	200,000,000	-	APBD I
				2	Pemantapan bagi TKSK	Jumlah TKSK	Kabupaten Tapanuli Selatan	14 Orang	100,000,000	APBD I	-	14 Orang	125,000,000	100,000,000	-	APBD I
				04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin				4,490,000,000				5,612,500,000	4,490,000,000		
				3	Usaha ekonomi produktif	Jumlah orang yang menerima usaha ekonomi produktif untuk ASLUT	Kabupaten Tapanuli Selatan	120 Orang	240,000,000	APBD I	-	120 Orang	300,000,000	240,000,000	-	APBD I
				4	Peningkatan kelompok usaha bersama (KUBE)	Jumlah kelompok usaha bersama	Kabupaten Tapanuli Selatan	100 Kelompok	2,000,000,000	APBD I	-	100 Kelompok	2,500,000,000	2,000,000,000	-	APBD I



			5	Penguatan modal usaha bagi KUMKM dan kelompok usaha	Jumlah kepala keluarga yang memperoleh modal usaha untuk KUMKM dan kelompok usaha	Kabupaten Tapanuli Selatan	800 Kepala Keluarga	2,000,000,000	APBD I	-	800 Kepala Keluarga	2,500,000,000	2,000,000,000	-	APBD I
			6	Penyediaan bantuan pembiayaan perumahan MBR	Jumlah Kepala Keluarga yang memperoleh pembiayaan perumahan MBR	Kabupaten Tapanuli Selatan	60 Kepala Keluarga	250,000,000	APBD I	-	60 Kepala Keluarga	312,500,000	250,000,000	-	APBD I
			16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				3,240,000,000				4,050,000,000	3,240,000,000		
			07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS				490,000,000				612,500,000	490,000,000		
			7	Bantuan pengobatan untuk ASLUT	Jumlah ASLUT yang menerima pengobatan	Kabupaten Tapanuli Selatan	700 OH	350,000,000	APBD I	-	700 OH	437,500,000	350,000,000	-	APBD I
			8	Bantuan peralatan sekolah	Jumlah anak kurang mampu yang menerima bantuan peralatan sekolah	Kabupaten Tapanuli Selatan	140 Orang	140,000,000	APBD I	-	140 Orang	175,000,000	140,000,000	-	APBD I
			12	Pembinaan/Monitoring Program Keluarga Harapan				150,000,000				187,500,000	150,000,000		



			9	Pelatihan kapasitas peningkatan pendamping program keluarga harapan (PKH)	Jumlah Pendamping PKH	Kabupaten Tapanuli Selatan	35 Orang	150,000,000	APBD I	-	35 Orang	187,500,000	150,000,000	-	APBD I
			13	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)				2,600,000,000				3,250,000,000	2,600,000,000		
			10	Penyelenggaraan kampung siaga bencana	Jumlah kampung siaga yang berada di kecamatan	Kabupaten Tapanuli Selatan	12 Kecamatan	1,500,000,000	APBD I	-	12 Kecamatan	1,875,000,000	1,500,000,000	-	APBD I
			11	Bantuan pasca bencana	Jumlah kecamatan yang menerima bantuan pasca bencana	Kabupaten Tapanuli Selatan	12 Kecamatan	200,000,000	APBD I	-	12 Kecamatan	250,000,000	200,000,000	-	APBD I
			12	Bantuan pemulihan dan reintegrasi sosial korban bencana	Jumlah kepala keluarga yang mendapat bantuan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial korban bencana	Kabupaten Tapanuli Selatan	500 Kepala Keluarga	200,000,000	APBD I	-	500 Kepala Keluarga	250,000,000	200,000,000	-	APBD I
			13	Pengadaan perlengkapan Tagana	Jumlah Tagana yang memperoleh perlengkapan Tagana	Kabupaten Tapanuli Selatan	35 Orang	700,000,000	APBD I	-	35 Orang	875,000,000	700,000,000	-	APBD I
			18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma				390,000,000				487,500,000	390,000,000		
			03	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma				390,000,000				487,500,000	390,000,000		



			14	Pelatihan disabilitas sosial	Jumlah disabilitas sosial yang mengikuti pelatihan	Kabupaten Tapanuli Selatan	100 Orang	390,000,000	APBD I	-	100 Orang	487,500,000	390,000,000	-	APBD I
			19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo				250,000,000	-	-		312,500,000	250,000,000		
			04	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo				250,000,000				312,500,000	250,000,000		
			15	Pembinaan panti asuhan dan panti jompo	Jumlah panti asuhan dan panti jompo yang terbina	Kabupaten Tapanuli Selatan	1 Tahun	250,000,000	APBD I	-	1 Tahun	312,500,000	250,000,000	-	APBD I
			21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				600,000,000				750,000,000	600,000,000		
			03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat				450,000,000				562,500,000	450,000,000		
			16	Pemantapan bagi organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS)	Jumlah organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial	Kabupaten Tapanuli Selatan	20 Organisasi	200,000,000	APBD I	-	20 Organisasi	250,000,000	200,000,000	-	APBD I
			17	Penyuluhan SDM Karang Taruna	Jumlah SDM Karang Taruna	Kabupaten Tapanuli Selatan	80 Orang	200,000,000	APBD I	-	80 Orang	250,000,000	200,000,000	-	APBD I
			18	Peningkatan dan pemberdayaan lembaga konsultasi keluarga	Jumlah lembaga konsultasi keluarga	Kabupaten Tapanuli Selatan	1 Lembaga	50,000,000	APBD I	-	1 Lembaga	62,500,000	50,000,000	-	APBD I



				06	Pelestarian Nilai-Nilai Kesetiakawanan			150,000,000				187,500,000	150,000,000			
				19.	Penguatan karakter bangsa untuk penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pendahuluan bela negara generasi muda	Kabupaten Tapanuli Selatan	80 Orang	150,000,000	APBD I	-	80 Orang	187,500,000	150,000,000	-	APBD I
Total APBD Provinsi								9,270,000,000				11,587,500,000	9,270,000,000			



Lampiran 3. Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun
2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

REKAPITULASI USULAN PROGRAM KEGIATAN
DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

No.	Sumber Dana	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2019 (Rp.)
1.	APBN	3	7	35.837.500.000	44.796.875.000
2.	APBD Provinsi Sumatera Utara	5	19	9.270.000.000	11.587.500.000
3.	APBD Kabupaten Tapanuli Selatan	10	35	2.950.000.000	4.382.914.000